



PENGARUH ATRIBUT SUMBER DAYA ALAM TERHADAP KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL VETNAM DI PERAIRAN INDONESIA

Yordania Mega Priyanti¹⁾, Herlina Juni Risma Saragih²⁾,

Agung Risdhianto³⁾, Hikmat Zakky Almubaraq⁴⁾

^{1,3,4)}Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan, Indonesia

²⁾Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan, Indonesia

Abstrak

Sumber daya alam merupakan salah satu komponen dalam kekuatan negara, setiap negara pasti mengeluarkan kebijakan untuk melindungi serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alamnya, termasuk Indonesia. Study ini menjelaskan bagaimana sumber daya alam sebagai atribut nasional suatu negara dapat mempengaruhi arah kebijakan negara tersebut. Penulis akan menganalisis kebijakan penenggelman kapal Vietnam di Perairan Indonesia pada tahun 2019 dengan Level of Analysis atribut nasional dan sumber daya alam sebagai eksplanannya. Sumber daya alam dianggap memegang peranan penting karena dapat mengubah arah kebijakan Indonesia dari yang sebelumnya pasif menjadi agresif. Sumber daya alam juga mendasari tindakan agresif suatu negara di perairan Indonesia. Bahkan dalam hal ini Indonesia mengeluarkan kebijakan yang secara militer terkesan agresif demi melindungi sumber daya alam negaranya. Berangkat dari pemahaman yang demikian maka sumber daya alam dianggap memiliki pengaruh penting dalam terbentuknya kebijakan politik luar negeri suatu negara.

Kata Kunci: Level of Analysis, Sumber Daya Alam, Kebijakan Penenggelman Kapal.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara kemaritiman dan sumber daya alam di laut yang melimpah dengan sumber daya ikan di laut 37 persen dari spesies ikan didunia (Putri, 2020). Hal ini tentunya menjadi celah untuk

melakukan illegal fishing maupun kejahatan lainnya yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Indonesia. Diketahui bahwa kapal milik *Vietnam Fishiers Resources Surveillance* (VFRS) menerobos masuk melewati Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan

*Correspondence Address : mega.yordania@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v10i8.2023.3858-3867

© 2023UM-Tapsel Press

Vietnam merupakan negara dominan pelaku IUUF di Laut Indonesia (Iqbal & Ambari, 2019). Adanya kejahatan tersebut, Indonesia melakukan kebijakan penenggelman kapan. Diketahui ada tujuh kapal bendera asing Vietnam ditenggelman di Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau pada 11 Mei 2019 (Ambari, 2019)

Sumber daya alam merupakan salah satu komponen dalam *National Attribute* yang dapat menggambarkan kedudukan suatu negara serta membentuk politik luar negeri suatu negara itu sendiri. Tidak jarang konflik yang terjadi antar negara bersumber karena masalah sumber daya alam dan geografinya. Menurut Klare, sumber daya alam dan kekurangannya juga dapat berperan dalam kebijakan luar negeri suatu negara (Hudson & Day, 2020). Geografi suatu negara juga akan mempengaruhi dan berperan dalam menjaga sumber daya alam sebagai kekayaan dan pertahanan negara. Hal tersebut menjadi alasan sumber daya alam menjadi salah satu komponen terpenting dalam *National Attribute* dikarenakan nantinya akan mempengaruhi bagaimana suatu negara mengambil arah politik luar negeri serta menyusun strategi negara itu sendiri agar dapat terus bertahan.

Penulis menganalisis pengaruh sumber daya alam sebagai national attribute dengan menggunakan *Level Analyze of National Attribute*. Dikutip dari ACIR berdasarkan Fearon (1998), and Ripley (1995), *National Attribute* merujuk pada karakteristik yang merupakan hasil konstruksi negara yang digunakan untuk menjalankan politik luar negerinya dan atribut nasional bukan hanya karakteristik suatu negara yang dapat dilihat dari tingkat analisis seperti politik dalam negeri serta identitas nasional (Raharjo & Puspitasari, 2022).

Negara yang cenderung memiliki sumber daya alam yang berlimpah

(*abundance*) akan tercermin dalam langkah pengambilan keputusan kebijakan politik luar negerinya yang terkesan pasif. Hal ini karena negara dapat mengandalkan kekayaan sumber dayanya dan memprioritaskan stabilitas dan non-interferensi untuk melindungi sumber dayanya dan mempertahankan hubungan perdagangan yang menguntungkan (Sun, 2013). Bertolak belakang dengan negara yang memiliki sumber daya alam yang langka (*scarcity*), maka langkah pengambilan kebijakan politik luar negerinya akan terkesan agresif.

Adanya sumber daya alam yang berada dalam kondisi geografis negara dapat mempengaruhi bagaimana negara bertindak (Raharjo & Puspitasari, 2022). Sumber daya alam dianggap memegang peranan penting karena dapat mengubah arah kebijakan Indonesia dari yang sebelumnya pasif menjadi agresif. Sumber daya alam juga mendasari tindakan agresif suatu negara di perairan Indonesia. Bahkan dalam hal ini Indonesia mengeluarkan kebijakan yang secara militer terkesan agresif demi melindungi sumber daya alam negaranya. Negara-negara kecil cenderung memiliki kebijakan politik luar negeri yang cukup berani dikarenakan mereka menyadari bahwa negara kecil memiliki keterbatasan dalam sumber daya alam, hal ini kemudian mendasari tindakan agresif yang dilakukan demi pemenuhan kebutuhan sumber daya alam negaranya.

Untuk membuat kajian mengenai sumber daya alam menjadi semakin fokus, maka penulis menganalisis contoh kasus dengan menggunakan atribut sumber daya kelautan Indonesia. Seperti yang diketahui Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sumber daya alam di laut yang sangat melimpah ruah. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki sumber daya yang melimpah yang dibuktikan

dengan memiliki 17.499 pulau selain itu Indonesia juga memiliki 3,25 juta kilometer persegi lautan, dan 2,55 juta kilometer persegi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) (Pratama, 2020). Hal ini membuat negara-negara tetangga seperti Vietnam yang merupakan negara kecil dengan sumber daya alam yang terbatas sering kali melakukan banyak pelanggaran batas wilayah dikarenakan adanya inisiatif untuk mengambil atau bahkan menguasai sumber daya alam yang ada di laut Indonesia, yang dalam hal ini Indonesia memberlakukan kebijakan peneggelaman kapal Vietnam.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi literatur dan penekatan naratif (John W. Cresswell, 2013). Dengan memilih studi literatur dan pendekatan naratif, peneliti dapat menggali dan mencari informasi yang relevan dengan pembahasan sehingga pembahasan dan hasil dalam penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan naratif berarti mengeksplorasi dan menyajikan karakteristik fundamental dari sebuah fenomena, yang berkontribusi dalam memahami lebih mendalam, misalnya melalui artikel-artikal baik di media online maupun cetak, buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen dari website pemerintah maupun non-pemerintah dan penelitian yang sudah ada sebelumnya serta dapat dipertanggungjawabkan. Terlebih dalam pengumpulan data dapat mencakup pengamatan, dan pemeriksaan catatan, laporan, foto maupun dokumen (Lambert & Lambert, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Level of Analyze: Urgensi Sumber Daya Alam Sebagai National Attribute Indonesia

Dilasir dari detik.com, menurut laporan Food and Argicultural Organization (FAO) menyatakan bahwa potensi sumber daya laut Indonesia mencapai 6,5 juta ton per tahun sedangkan kekayaan alam Vietnam dikenal sebagai lumbung padi bagi negara-negara ASEAN (Yulianti, 2023). Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kekayaan sumber daya kelautan yang berlimpah. Juga memperjelas fakta bahwa Vietnam menempati posisi yang dibawah Indonesia dalam aspek sumber daya alam kelautan karena Vietnam lebih menonjol bidang pertanian khususnya padi.

Dalam melakukan pengambilan kebijakan politik luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia dengan Vietnam juga berbeda berdasarkan dari sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara. Apabila dilihat dari penjelasan Hudson, negara Indonesia merupakan negara *abundance* atau negara yang memiliki sumber daya dilaut melimpah, sedangkan Vietnam merupakan negara yang *scarcity* atau yang memiliki sumber daya laut dibawah Indonesia. Politik luar negeri Indonesia cenderung lebih pasif dibandingkan dengan Vietnam yang sumber daya lautnya lebih sedikit sehingga Indonesia cenderung lebih mengedepankan diplomasi daripada konfrontasi seperti contohnya melakukan perundingan bilateral terkait teritori, mempertimbangkan historis hubungan antar Indonesia dengan Vietnam dan menjadikan opsi peneggelaman kapal ilegal sebagai pilihan terakhir dalam penyelesaian suatu konflik.

Berbeda dengan Vietnam yang politik luar negerinya lebih terkesan agresif dibandingkan dengan Indonesia, seperti contohnya melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan yang belum jelas batas wilayahnya tanpa pertimbangan yang lebih matang, dan sering kali melakukan pelanggaran batas

wilayah dengan memasuki wilayah perairan Indonesia dan melakukan perlawanan terhadap penegak hukum Indonesia. Meskipun demikian, Indonesia masih tetap berpegang teguh pada politik luar negeri bebas aktif, dan seperti sebelum-sebelumnya, Indonesia cenderung menghindari konflik dan lebih mengedepankan dan mementingkan kerjasama antar negara, maka Indonesia semaksimal mungkin akan menggunakan cara diplomasi dengan baik sebelum akhirnya memutuskan suatu kebijakan luar negeri.

Ketertarikan antara *National Attribute* mengenai sumber daya alam ini sangatlah berpengaruh penting dalam hal perumusan kebijakan politik luar negeri suatu negara. Konsepsi hak penguasaan atas sumber daya alam sangat penting untuk memberikan kepastian hak bagi setiap pihak atas sumber daya alam yang dimiliki dan dikuasainya (widowati et al., 2019). Sehingga aspek sumber daya alam yang sangat mudah dilihat sebagai penentu *power* dari negara itu sendiri, serta ukuran dari suatu negara tersebut yang pada akhirnya akan mempengaruhi sumber daya alam didalamnya, selain itu juga komponen untuk melindungi dan mencapai kepentingan nasional dari negara itu sendiri.

Agresifitas Vietnam Sebagai Negara Dengan Sumber Daya Alam Terbatas

Seperti yang sempat disinggung sebelumnya, Vietnam merupakan negara yang memiliki sumber daya alam dilaut yang dibawah Indonesia, kondisi yang demikian membuat negara ini melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia. Vietnam telah melakukan *illegal fishing* beberapa kali di perairan Indonesia sehingga hal

ini menyita perhatian publik khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. Tidak hanya itu pelanggaran batas teritorial juga kerap terjadi. Vietnam juga tidak segan mengambil tindakan agresif seperti melakukan penabrakan terhadap kapal Indonesia. Adanya praktik *Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing* dilaut Natuna Utara Kuartal-1 2021 dalam kondisi Kritis (oceanjusticeinitiative.org, 2019). Kejadian ini menunjukkan secara konkret keagresifan Vietnam dibuktikan dengan banyaknya kapal Vietnam yang masuk ke perairan Indonesia dan melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia.

Kejadian di perairan Natuna, dimana empat kapal vietnam yang melakukan penangkapan ikan secara illegal. Ketika TNI AL hendak melakukan penangkapan yang terjadi malah diluar dugaan. Kapal Dinas Perikanan Vietnam berusaha menabrakkan diri kapal TNI AL dengan menyenggolkan lambung kapalnya ke KRI TNI AL di Laut Natuna. Sebelumnya kapal bernomor lambung KN 213 dan bertuliskan *Vietnam Name Resources Surveillance* ini mendekati kapal TNI AL dan bermanuver, KN 213 lalu menabrak kapal TNI AL. Ada banyak insiden kejahatan yang dilakukan oleh Vietnam yang membuat Indonesia jerah akan masuknya kapal asing Vietnam di perairan Indonesia.

Kapal Dinas Perikanan Vietnam menabrakkan badan kapalnya ke KRI Tjiptadi-381 sebagai bentuk perlawanan dan upaya untuk melindungi kapal nelayan Vietnam yang tengah menangkap ikan. Hal ini terjadi karena lokasi penangkapan ikan tersebut merupakan lokasi yang masih diperdebatkan batas ZEE-nya, oleh karena itu pemerintah Vietnam menganggap bahwa lokasi tersebut adalah bagian dari teritorinya, begitu pula dengan pemerintah Indonesia.

Jika dikaitkan dengan kasus yang terjadi, terlepas dari Vietnam atau

Indonesia yang salah, karena kedua belah pihak menuding pihak lainnya yang salah dan telah memasuki batas teritorial laut negaranya, tapi tindakan Vietnam yang berani menabrakkan kapal ke KRI TNI AL merupakan bentuk konkret agresif Vietnam dalam kasus ini. Dalam hal ini Vietnam dianggap telah memuntahkan peluru terlebih dahulu dengan melakukan penabrakan kapal TNI AL.

Prosedur penangkapan kapal Vietnam sudah diawali dengan peringatan terlebih dahulu, dalam tenggang waktu seminggu dari pemberitahuan yang telah diberikan untuk meminimalisir adanya ketegangan atau insiden yang lebih buruk. Akan tetapi Kapal Vietnam mengabaikan peringatan tersebut. Pengabaian ini membuat Indonesia mengambil langkah nyata untuk melakukan penangkapan namun ternyata Vietnam mengambil tindakan yang jauh lebih agresif dengan menabrak kapal Tentara Nasional Indonesia.

Discussion

Pasifisme Indonesia Sebagai Negara Dengan Sumber Daya Alam Berlimpah

Sebuah negara memiliki sikap yang minim perhatian ketika dihadapkan kekayaan yang melimpah di negaranya. Karena sumber daya yang dimiliki melimpah dan negara yang memiliki sumber daya alam cenderung negara berkembang akan lebih susah dalam mengatur dan mengolahnya. Berdasarkan Hudson yaitu negara yang cenderung memiliki sumber daya alam yang berlimpah (*abundance*) maka dalam langkah pengambilan keputusan kebijakan politik luar negerinya akan terkesan pasif. Indonesia selain memiliki masyarakat yang cenderung pasif dan bahkan acuh terhadap sumber daya alam yang dimiliki oleh negara Indonesia, juga memiliki pemerintahan yang juga cenderung pasif dalam hal mengatur

kebijakan politik luar negeri yang berkaitan dengan sumber daya alam dan memaksimalkan sumber daya alam yang dimiliki demi kepentingan bangsa dan negara. Perilaku pemerintah Indonesia yang pasif dalam mengatur dan memaksimalkan sumber daya alam yang dimiliki dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang berbeda-beda.

Pemerintahan Indonesia di masa pemerintahan Jokowi lebih mementingkan kekuatan dari diplomasi daripada langsung menggunakan kekuatan angkatan bersenjata. Salah satu kebijakan luar negeri yang diinginkan di masa pemerintahan presiden Jokowi adalah mewujudkan perdamaian dunia melalui dialog-dialog antar petinggi-petinggi negara.

Indonesia terkenal memiliki angkatan bersenjata yang besar dan hebat terutama di bidang kelautan. Prioritas itu terus berlanjut di bawah Presiden Indonesia Joko Widodo, dengan fokus pada aspek-aspek seperti meningkatkan industri pertahanan negara. Angkatan Laut Indonesia saat ini mengoperasikan tiga kapal KCR-60M yang ditugaskan sejak tahun 2014 dan juga terdapat indikasi bahwa pekerjaan PT PAL untuk militer Indonesia akan terus meningkat hingga tahun 2018 dan seterusnya, termasuk empat kapal serang cepat KCR-60 tambahan, menyusul kapal serang yang sudah diproduksi.

Walau dengan kekuatan dan kelemahan kekuatan armada laut, Indonesia tetap bukan negara yang secara langsung menggunakan kekuatan armada lautnya untuk menyelesaikan permasalahan seperti: pelanggaran batas teritorial laut yang dilakukan oleh kapal-kapal asing dan nelayan asing yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah "Zona Ekonomi Eksklusif" Indonesia. Indonesia tetap mengupayakan jalur diplomasi saat berhadapan dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut, karena memang

itulah yang diinginkan oleh kebijakan luar negeri masa pemerintahan Jokowi. Meskipun Menteri Kelautan Indonesia saat ini yaitu Susi Pudjiastuti menerapkan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang agresif dan disiplin agar wilayah perairan Indonesia tidak dengan mudah dimasuki oleh kapal-kapal asing, namun tetap saja Menteri Susi berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia di saat akan melakukan aksi pengeboman kapal-kapal asing yang mengambil diam-diam hasil sumber daya laut Indonesia.

Berkaitan dengan pelanggaran teritorial, pencurian hasil sumber daya laut dan aksi brutal kepada kapal penjaga pantai Indonesia yang dilakukan oleh nelayan dan *naval coast* Vietnam, Menteri Susi tidak serta merta langsung melakukan aksi agresif terhadap tindakan kapal-kapal Vietnam tersebut. Menteri Susi hanya mengamankan kapal-kapal yang melanggar tersebut sembari memulangkan para awak kapal kembali ke Vietnam, kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia agar segera melakukan aksi lanjutan terhadap pelanggaran kapal-kapal dari Vietnam.

Sikap yang dilakukan oleh Menteri Susi dan Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan mengamankan kapal-kapal Vietnam namun tetap memulangkan para awak kapal sembari melakukan pemanggilan terhadap para petinggi Vietnam daripada melakukan eksekusi langsung bukan tanpa sebab. Indonesia dan Vietnam telah melakukan diplomasi selama 64 tahun. Dengan sejarahnya yang lama tersebut, selama ini, hubungan bilateral Vietnam-Indonesia telah teruji dan semakin berkembang terus-menerus. Dua negara selalu bahu-membahu berjalan bersama agar dapat menjaga perdamaian sekaligus keamanan regional, hingga memberikan kesejahteraan kepada rakyat-nya masing-masing dan menuju ke target bersama dalam pengembangan

ekonomi. Maka dari itu, agar tetap menjaga perdamaian dunia dan dengan negara-negara tetangga khususnya, sesuai dengan keinginan Jokowi dan para pendahulunya, Indonesia selalu mengutamakan diplomasi dalam menyelesaikan segala macam permasalahan yang dihadapi pada skala internasional daripada melakukan eksekusi langsung atau langkah-langkah agresif lainnya, sehingga Indonesia terlihat pasif dalam melakukan kebijakan politik internasional terutama di bidang sumber daya alam.

Pergeseran Perilaku Indonesia Dari Pasif Ke Agresif

Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai melakukan peneggelaman kapal asing yang kedapatan mencuri ikan diperairan Indonesia dari lima puluhan kapal asal Vietnam tiga belas diantaranya ditenggelamkan dengan cara membocorkan kapal dan selanjutnya diisi air. Pihak Vietnam menyatakan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia melakukan peneggelaman kapal asing dipandang sebagai kebijakan yang mengganggu hubungan persahabatan (UMM, n.d.).

Terlihat jelas bagaimana Indonesia sebagai negara dengan pemilik sumber daya alam yang berlimpah melakukan tindakan yang lebih pasif daripada Vietnam yang secara terang-terangan berlaku agresif dengan menabrakkan Kapal Dinas Perikanan milik Vietnam ke kapal patroli TNI AL Indonesia. Namun pergeseran anggapan bahwa *national attribute* sumber daya alam suatu negara dimana negara pemilik sumber daya alam berlimpah yang cenderung pasif dan negara yang tidak memiliki sumber daya alam cenderung agresif mulai memudar. Adanya kesadaran akan kepentingan negara untuk menjaga sumber daya alam mulai muncul ketika masing-masing negara memahami pentingnya sumber

daya alam sebagai kebutuhan yang paling utama. Upaya negara dalam melindungi kepentingannya akan tercermin pada proses pertimbangan dan perundingan yang dilakukan dan jika tidak menemukan hasil akan dilakukan inisiasi. Kebijakan yang diambil atas fenomena penenggelaman kapal Vietnam ini telah dirancang untuk melindungi sumber daya alam milik negara. Presiden Indonesia dibantu oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti merancang bagaimana kebijakan penenggelaman kapal ini dilakukan. Dalam usaha melindungi kedaulatan negara dan memperlihatkan sikap tegas negara, Menteri Susi Pudjiastuti menganggap bahwa kebijakan tersebut adalah jalan keluar terhadap penangkapan ikan yang ilegal serta merugikan sumber daya perikanan Indonesia.

Perairan Natuna yang menjadi lokasi penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh Vietnam memang masih menjadi sengketa, dimana kedua negara baik Indonesia maupun Vietnam mengakui perairan tersebut sebagai bagian dari teritorinya. Upaya memperjelas batas-batas negara sudah dilakukan Indonesia dengan perundingan bilateral, namun memang prosesnya membutuhkan waktu yang tidak singkat. Banyaknya aspek yang harus dipertimbangkan mengingat yang disenkatakan adalah batas laut ZEE, yang otomatis akan berdampak pada kemampuan ekonomi suatu negara.

Kondisi yang demikian membuat Indonesia semakin waspada terhadap berbagai kemungkinan yang dapat mengancam kelangsungan sektor industrinya termasuk penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh nelayan asing yang masuk tanpa izin. Angka kegiatan illegal fishing yang tidak dilaporkan dan tidak diatur diperkirakan telah mencapai 4.326 unit kapal lokal maupun asing. Potensi ikan Indonesia yang dicuri mencapai 25%. Kondisi ini

semakin menekan Indonesia untuk membuat tindakan yang tegas guna melindungi sumber dayanya.

Fenomena penenggelaman kapal Vietnam menjadi salah satu bentuk kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dalam upaya melindungi kepentingan negara. Urgensi atas aspek maritim sendiri sudah sejak lama diterapkan oleh Indonesia. Dengan dasar perlindungan sumber daya alam menjadi latar belakang, kebijakan-kebijakan untuk menjaga ketahanan laut Indonesia banyak ditetapkan. Presiden Jokowi yang dibantu oleh menteri-menterinya mengkaji bagaimana kebijakan ini agar tepat guna dan nantinya dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat. Tak hanya elemen masyarakat, namun pemerintah juga menjalin kerjasama dengan negara lain lewat forum-forum tertentu. Salah satunya adalah Indonesia akan mendorong kemitraan maritim di KTT D-8 Di Istanbul yang dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. KTT kesembilan Organisasi Pengembangan-8 untuk Kerjasama Ekonomi.

Aspek instrument negara juga ikut menjadi pertimbangan terkait bagaimana kebijakan poros maritim dunia diterapkan. Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (3) disebutkan, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Dalam rangka mensukseskan kebijakan poros maritim, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia telah diterbitkan. Fokusnya adalah untuk melindungi kepentingan negara dan memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Implementasi penerapan kebijakan poros maritim dunia di bawah pemerintahan presiden jokowi juga tidak lepas dari reaksi negara-negara baik yang berbatasan langsung dengan Indonesia khususnya kawasan Asia Tenggara maupun tidak berbatasan

langsung. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi hubungan harmonis yang dibangun di dalam kawasan dan organisasi. Ketika reaksi tersebut secara jelas ditujukan langsung secara terbuka, tentu akan mempengaruhi interaksi antar negara di dalam kawasan tersebut. Indonesia disatu sisi ingin menegakkan kedaulatan negara dengan memunculkan identitas sebagai negara maritim. Namun, kebijakan tersebut tentunya akan berhalangan dengan kepentingan negara lain dimana ada batasan tertentu khususnya terkait ancaman terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran penangkapan ikan secara ilegal. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan diplomasi maritim untuk dapat menjalin kerja sama berbasis laut dan memberikan informasi bagaimana diplomasi maritim Indonesia dilakukan.

Sebelum menenggelamkan kapal, terlebih dahulu pemerintah telah melakukan kontak dengan perwakilan negara tetangga untuk membicarakan kebijakan negara atas insiden tersebut. Perwakilan negara Vietnam yang ikut terlibat dalam permasalahan ini menyetujui sikap Indonesia untuk melakukan kebijakan tersebut. Kedua negara telah bersepakat bahwa tindakan yang diambil berdasarkan pada tindakan penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU fishing). Tindakan penenggelaman kapal sendiri bukan tanpa dasar hukum negara, Pasal 76A UU No. 45/2009 tentang Perubahan Atas UU No 31/2004 tentang Perikanan menjadi acuan atas tindakan penenggelaman kapal. Pasal ini memuat tentang bagaimana persetujuan pengadilan negeri untuk memberikan tindakan pidana perikanan yang dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan.

Menteri kelautan beranggapan bahwa nilai yang diberikan oleh kapal yang telah dilelang ini tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan

dalam aspek ekonomi. Maka dari itu, Menteri Susi Pudji Astuti mempertimbangkan bahwa tindakan penenggelaman jauh lebih tepat daripada lelang dan pemusnahan dengan cara dibakar. Tindakan pemusnahan sendiri akan dilakukan ketika dirasa perlu untuk memberikan efek menakuti dan efek jera bagi pelaku. Dengan cara penenggelaman kapal, tindakan tersebut akan dirasa jauh lebih ramah lingkungan karena kapal yang sudah tenggelam nantinya akan jadi lingkungan baru bagi biota laut.

Kebijakan terkait penenggelaman kapal ini mencerminkan bahwa pergeseran fokus Indonesia terkait sumber daya alam beralih. Indonesia yang sebelumnya melakukan perundingan dengan perwakilan negara lain terkait sikap-sikap yang dilakukan oleh kapal-kapal ilegal ini mencerminkan bahwa Indonesia masih berupaya untuk melakukan tindakan pasif. Namun, ketika perundingan tersebut dirasa tidak mencapai konsensus kedua belah pihak, Indonesia melakukan pergeseran sikap dari pasif ke agresif.

Bentuk kebijakan penenggelaman sebelumnya secara spontan dilakukan oleh negara. Faktor pendukung bagaimana kebijakan penenggelaman ini diambil adalah instrumen hukum yang diambil oleh Presiden Jokowi yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Th. 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Dalam Pemerintahan sebelumnya, peraturan presiden tentang bagaimana kebijakan kelautan Indonesia belum diatur sepenuhnya, dan dalam pemerintahan Jokowi mulai untuk berfokus pada poros maritim dunia. Hal ini mengindikasikan bahwa negara akan bertindak spontan ketika kedaulatan mereka terganggu, termasuk dalam hal sumber daya alam. Sumber daya alam menjadi salah satu *national atribut* negara yang sangat penting untuk dipertahankan. *National*

atribut sumber daya alam nantinya akan berdampak pada aspek atribut lainnya, seperti aspek ekonomi negara dan juga aspek militer negara.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam sebagai atribut nasional dapat memengaruhi arah kebijakan politik luar negeri suatu negara. Sumber daya alam dianggap dapat mendefinisikan konsep power dalam hubungan internasional. Hal ini tercermin dari kebijakan penenggelman kapal Vietnam di perairan Indonesia pada tahun 2019. Kebijakan penenggelman ini terlihat jelas bahwa Indonesia mengambil tindakan tegas berupa penenggelman kapal Vietnam yang melakukan *illegal Fishing* di laut Natuna demi mengamankan sumber daya alam kelautan yang dimilikinya.

Dikaitkan dengan *level of analyze of national attribute* dan data, Indonesia tergolong sebagai negara *abundance* yang memiliki sumber daya alam berlimpah sedangkan Vietnam tergolong sebagai negara *scarcity* yang memiliki sumber daya alam dilaut yang dibawah Indonesia. Hal itu selaras dengan ukuran negara Indonesia yang lebih luas dibandingkan dengan Vietnam. Terlebih fakta yang menunjukkan bahwa perairan mendominasi wilayah teritori Indonesia semakin mengukuhkan statusnya sebagai negara *abundance*.

Indonesia yang awalnya bersifat pasif dalam hal ini dapat diartikan bahwa Indonesia lebih mengedepankan upaya diplomasi daripada konfrontasi. Hal itu tercermin dari beberapa tindakan Indonesia, seperti upaya perundingan bilateral terkait kepemilikan teritori. Indonesia juga sangat mempertimbangkan historis hubungan bilateral dengan Vietnam, sehingga kebijakan yang diambil diusahakan tidak menciderai kerja sama yang selama ini terbangun. Selain itu Indonesia juga

menjadikan penenggelman kapal yang terkesan agresif sebagai pilihan terakhir dalam penyelesaian konflik. Berbeda dengan Vietnam sebagai negara dengan sumber daya alam dilaut yang dibawah Indonesia, Vietnam cenderung bersikap agresif. Sehingga Vietnam berani mengambil ikan di perairan yang bahkan masih belum jelas batasnya.

Kondisi sumber daya alam yang semakin terancam dengan adanya penangkapan ikan ilegal semakin menekan Indonesia untuk bertindak tegas. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi terbentuknya kebijakan penenggelman kapal yang tertangkap melakukan pelanggaran *illegal fishing* di perairan Indonesia. Kebijakan penenggelman kapal asing ini merupakan wujud konkret yang dilakukan Indonesia untuk mengamankan sumber daya alam yang dimilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambari, M. (2019, May 14). *Penenggelman Kapal Pencuri Ikan Jalan Keluar Terbaik bagi Indonesia - Mongabay.co.id : Mongabay.co.id*. Mangabay.Co.Id. <https://www.mongabay.co.id/2019/05/14/penenggelman-kapal-pencuri-ikan-jalan-keluar-terbaik-bagi-indonesia/>
- Hudson, V. M., & Day, B. S. (2020). *Foreign policy analysis : classic and contemporary theory* (Third). Rowman & Littlefield.
- Iqbal, D., & Ambari, M. (2019, February 27). *Vietnam, Negara Dominan Pelaku IUUF di Laut Indonesia - Mongabay.co.id : Mongabay.co.id*. Mangabay.Co.Id. <https://www.mongabay.co.id/2019/02/28/vietnam-negara-dominan-pelaku-iuuf-di-laut-indonesia/>
- John W. Cresswell. (2013). *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches. Fourth Edition*.
- Lambert, V. A., & Lambert, C. E. (2012). *Qualitative Descriptive Research: An Acceptable Design*. In *Pacific Rim Int J Nurs Res*.

oceanjusticeinitiative.org. (2019, April 29). *IUU Fishing Di Laut Natuna Utara Kuartal-I 2021 Dalam Kondisi Kritis - Indonesia Ocean Justice Initiative*. Indonesia Ocean Justice Initiative.

<https://oceanjusticeinitiative.org/2021/04/29/iuu-fishing-di-laut-natuna-utara-kuartal-i-2021-dalam-kondisi-kritis/>

Pratama, O. (2020, July 1). *Konservasi Perairan Sebagai Upaya Menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia*. Kementerian Kelautan Dan Perikanan

<https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>

Putri, A. S. (2020, May 29). *Potensi Sumber Daya Alam Lautan Halaman all - Kompas.com*. Kompas.Com.

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/29/090000069/potensi-sumber-daya-alam-lautan?page=all>

Raharjo, T. A., & Puspitasari, I. (2022). National Attributes in Foreign Policy: Poland Eastern Partnership. *Proceedings of Airlangga Conference on International Relations (ACIR 2018) - Politics, Economy, and Security in Changing Indo-Pacific Region*, 596–601. <https://doi.org/10.5220/0010280800002309>

Sun, Y. (2013). *THE BROOKINGS INSTITUTION CENTER FOR NORTHEAST ASIAN POLICY STUDIES CHINESE NATIONAL SECURITY DECISION-MAKING: PROCESSES AND CHALLENGES*. <http://www.brookings.edu>

UMM. (n.d.). *BAB III Pelanggaran Vietnam Terhadap Kedaulatan Maritim di Indonesia*. Retrieved August 14, 2023, from <https://eprints.umm.ac.id/53201/4/BAB%20III.pdf>

widowati, D. A., Yurista, A. P., & Bosko, R. E. (2019). Hak Penguasaan Atas Sumber Daya Alam Dalam Konsepsi dan Penjabaran Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16.

Yulianti, C. (2023, February 11). *Daftar Negara ASEAN dan Sumber Daya Unggulnya, Indonesia Punya Apa Saja?* <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6562669/daftar-negara-asean-dan-sumber-daya-unggulnya-indonesia-punya-apa-saja>